

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan publik kepada warga negara. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan cermin pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Kepala daerah memegang peranan penting dalam proses pencapaian kinerja karena keputusan dan tindakan yang diambil akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kepala daerah yang baik dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting yang perlu dilakukan atas umpan balik suatu rencana yang telah diimplementasikan karena kinerja organisasi sektor publik dipengaruhi oleh konstitusi dan faktor. Selain itu, tuntutan pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini. Kepala daerah merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah suatu daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintah Daerah juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemerintah Daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Chaw, *et al* (2001) dalam Sumarjo (2010) pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 74 tahun 2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 5 Permendagri No.73 Tahun 2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Total indeks komposit Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikeluarkan

pertama kali oleh Kementrian dalam negeri tahun 2009 atas LPPD tahun anggaran 2007.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berdasarkan Permenpan No. 25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Termasuk pemerintah daerah tingkat II yang disebut dengan kepala daerah Kabupaten atau Kota Madya yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota. Setiap Kabupaten atau Kota Madya akan dipimpin oleh satu orang Bupati atau satu orang Walikota didaerah tersebut. DiIndonesia terdapat banyak kepala daerah Kabupaten atau Kota Madya yang berjumlah 514 orang yang terdiri dari 416 Bupati dan 98 Walikota.

Akan tetapi, penelitian mengenai dampak karakteristik kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya *gap* mengenai dampak kepala daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga perlu penelitian yang mendalam mengenai hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dampak karakteristik kepala daerah yang mencakup Masa Jabatan, Umur, *Gender*, Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Mengacu Undang-undang 32 Tahun 2004, kepala daerah diamanatkan untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan rakyat selaku *principal* kepadanya untuk mengelola dan melaksanakan anggaran dan program pemerintah. Hubungan masyarakat selaku *principal* yang mengamatkan kepada pemerintah daerah (*agent*) yang sudah terpilih dalam pemilukada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk hubungan keagenan (Arifianti *et. al*, 2013).

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Masa Jabatan kepala daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Umur kepala daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah?
3. Apakah *Gender* kepala daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Tingkat Pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Masa Jabatan, Umur, *Gender* dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus untuk menggali masalah pada Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia pada tahun 2018.

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Masa Jabatan kepala daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Umur kepala daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Gender* kepala daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan kepala daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Masa Jabatan, Umur, *Gender* dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan mengenai peningkatan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai karakteristik kepala daerah dalam peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Partai Politik

Penelitian diharapkan memberikan masukan partai politik dalam mengungkap rekruitmen kandidat kepala daerah lebih baik dan selektif dengan pertimbangan karakteristik kepala daerah dan kriteria integritas, kualitas, kredibilitas, maupun jiwa kepemimpinan sering kali tidak diperhitungkan.

3. Bagi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian pada laporan proposal yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.